



**BUDAYA POLITIK LOKAL PADA PILKADES DI KECAMATAN LAGE
KABUPATEN POSO TAHUN 2010**

Immanuel N. Tadanugi

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

Info Artikel	Abstrak
<i>Sejarah Artikel</i>	Suksesi kepemimpinan lokal di Kecamatan Lage secara umum positif dan relatif demokratis. Tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor agama, afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Selain nilai - nilai positif dalam konteks demokrasi lokal, Pilkades di Kecamatan Lage juga berpotensi menciderai demokrasi. Pertama, munculnya calon tunggal. Kedua, maraknya isu <i>money politics</i> . Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Kecamatan Lage, termasuk di Kabupaten Poso, sejak masa dulu hingga era reformasi saat ini tidak bisa meniadakan Praktik <i>money politics</i> , yang berpotensi dapat menciderai demokrasi. Beberapa perilaku yang berpotensi menciderai demokrasi di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.
<i>Kata Kunci:</i> Budaya Politik Lokal, Suksesi Lokal, Money Politics	

PENDAHULUAN

Budaya politik lokal di Kecamatan Lage dalam kaitannya dengan demokrasi, Merupakan gerakan reformasi terhadap dinamika politik lokal daerah di tingkat bawah, Agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif tentang relasi budaya politik lokal dengan demokrasi, kajian ini akan membahas pula fenomena-fenomena tersebut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa yang akan diteliti.

Kecamatan Lage merupakan wilayah Kabupaten Poso yang cukup luas di antara 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso penduduknya, Kecamatan Lage terdiri dari 16 Desa termasuk desa yang baru saja di mekarkan yaitu Desa Labuadago hasil pemekaran dari Desa Silanca.

Mayoritas penduduk Kecamatan Lage adalah suku Poso Pamona dan secara etnisitas cenderung heterogen. Dengan demikian suku Poso Pamona tersebar di hampir seluruh wilayah Kecamatan Lage, Hampir di sebagian kecil Kecamatan Lage terdapat minoritas suku Jawa, Bugis, Minahasa dan Toraja. Mereka umumnya bekerja di sektor pertanian.

Adapun suku Jawa banyak terdapat di desa Watuawu mereka adalah warga korban bencana Lapindo. Sedangkan agama di dominasi oleh Nasrani \pm 90 % tinggal di sejumlah wilayah yang ada di Kecamatan Lage.

TEORI DAN KONSEP

1. Budaya Lokal

Tiga perspektif sosiokultural Kecamatan Lage yang paling dominan, yakni: budaya Mosintuwu, Untuk itu kajian ini juga dilakukan dikecamatan Lage dan sekitarnya. Adapun Desa Tagolu dipilih karena Desa ini adalah ibu kota Kecamatan Lage dan desa ini berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan *good governance*. Adapun dasar pertimbangan lain dipilihnya Desa Tagolu dikarenakan kecamatan tersebut berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara aman dan Demokratis, yang merupakan prosesi demokrasi langsung tingkat desa yang

pertama di era reformasi dan berlangsung secara aman, damai dan demokratis.

2. Hubungan Budaya Politik Lokal dengan Demokrasi

Mayarakat Kecamatan Lage dikenal dengan karakter budayanya yang terbuka dan saling membantu (Mosintuwu), Hal itu tercermin dalam relasi sosial sehari-hari antar masyarakat atau dalam seni budaya yang populer di masyarakat, seperti pesta nikah, duka dan acara syukuran baik pribadi maupun kegiatan desa, Sejak zaman penjajahan sampai dengan sekarang, Masyarakat Kecamatan Lage yang kontemporer juga sering merespon peristiwa-peristiwa politik melalui sikap budaya. Sejak tahun 1960-an.

3. Suksesi Kepemimpinan Lokal

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh elite politik di DPRD seperti era Orde Baru, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkada. Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Melalui Pilkada, rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya yang mereka nilai aspiratif, kapabel, kredibel dan akseptabel. Inilah lompatan demokrasi yang cukup penting dalam langkah sosio-politik Indonesia, dan yang bercorak sentralistik di masa Orde Baru menjadi desentralistik di era reformasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran fakta objek yang diteliti tentang Budaya Politik Lokal Pada Pilkades Di Kecamatan Lage Kabupaten Poso Tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lage yang mempunyai hak untuk memilih pada Pilkades Tahun 2010 berjumlah 13.452 Jiwa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan bertujuan memilih beberapa orang dengan pertimbangan tertentu untuk memberikan data/informasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang berdasarkan *Cluster Sampling*. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

1. Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Lage Kabupaten Poso

Tahun 2010 Desa Tagolu menjadi model percontohan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara aman langsung dan demokratis. Sehingga harapan masyarakat siapapun yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pilkades diharapkan dapat mencegah permainan para botoh (penjudi) yang terbiasa menjadikan Pilkades sebagai ajang taruhan perjudian. Tidak jarang, permainan para botoh itu menimbulkan kekisruhan di masyarakat karena mereka sering melakukan praktik-praktik kotor dan menciderai demokrasi, seperti membeli suara, menyuap panitia untuk melakukan kecurangan, atau meneror calon pemilih untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu agar kandidat yang dipertaruhkan meraih kemenangan.

Pilkades menjadikan suasana demokrasi di desa-desa di suatu kabupaten dirasakan lebih hidup dan dapat memacu tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Golput boleh dikatakan tidak ada. Justru masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya banyak yang mengeluh karena waktu pencoblosan mereka berhalangan karena bekerja atau sedang bepergian ke luar daerah. Hal ini menandakan kesadaran politik masyarakat desa sudah sangat tinggi.

Demokrasi di sejumlah desa di Kecamatan Lage, juga sudah cukup maju. Misalnya, dengan dilakukannya konvensi di sebuah dusun atau pedukuhan untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam Pilkades. Dari beberapa calon yang maju dalam konvensi di pedukuhan, dipilih satu calon pemenang yang mendapat suara terbanyak dan akan mewakili dusun atau pedukuhan tersebut dalam perebutan posisi kepala desa, bersaing dengan calon dari dusun lainnya. Saat Pilkades berlangsung, pada umumnya suara masyarakat di pedukuhan tersebut

cukup solid untuk mendukung calon dari dusunnya masing-masing.

Model konvensi calon kades di beberapa desa di Kecamatan Lage tersebut merupakan praktik demokrasi modern. Hal ini menandakan bahwa pengaruh globalisasi demokrasi sudah masuk dan diadopsi desa-desa di kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Temuan lain yang patut dikemukakan dalam studi tentang pelaksanaan suksesi kepemimpinan lokal di desa adalah netralitas birokrasi. Bupati dan Camat pada umumnya tidak melakukan intervensi untuk mendukung kandidat tertentu sehingga asas *fairness* terjaga dengan baik dalam prosesi demokrasi di desa tersebut. Begitu juga dengan *incumbent* yang maju dalam Pilkades. Sejauh ini tidak terlihat adanya upaya mobilisasi masyarakat atau politisasi birokrasi pemerintahan desa oleh kepala desa yang sedang menjabat dan maju kembali dalam Pilkades untuk kepentingan politiknya.

Berdasarkan temuan penelitian dalam pelaksanaan suksesi kepemimpinan lokal di desa-desa yang ada di kecamatan Lage Kabupaten Poso tersebut, tampak bahwa implementasi demokrasi di desa-desa yang diteliti di Kecamatan Lage lebih *genuine*, partisipatif dan memenuhi asas *fairness* dibandingkan dengan suksesi kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Dari 16 Desa Di Kecamatan Lage, Desa yang pertama kali menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara Langsung adalah Desa Tagolu yang merupakan Ibu kota Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Kecamatan ini memiliki 16 desa, Dari jumlah tersebut, di antaranya atau hampir 60% sudah melaksanakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada awal dan akhir tahun 2010, sedangkan desa yang lainnya menyusul kemudian karena masa jabatan kepala desa masih berlangsung. Untuk melaksanakan Pilkades di desa tidaklah mudah. Sebab, ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Para tokoh masyarakat akhirnya menerima dan mendukung pelaksanaan Pilkades secara aman

dan demokratis. Tercatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Tagolu juga cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Bagian pemerintahan Kabupaten Poso, partisipasi masyarakat dalam Pilkades rata-rata di atas 90%. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan karena mereka memprotes, melainkan karena kendala-kendala teknis, seperti bepergian ke luar daerah atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

2. Perspektif Demokrasi

Pilkades Desa di Kecamatan Lage memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan dalam perkembangan demokrasi lokal. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, akulturasi nilai-nilai demokrasi modern telah terjadi di desa-desa yang diteliti di Kabupaten Poso.

Ada beberapa catatan penting dan temuan lapangan. Pertama, pluralitas latar belakang kandidat, baik dan segi agama maupun jenis kelamin. Meskipun mayoritas penduduk di desa-desa Kecamatan Lage beragama Kristen, mereka bisa menerima kandidat yang beragama lain. Sebagai contoh, selama satu periode Desa Sintuwulemba dipimpin oleh kepala desa yang beragama Kristen Protestan. Selama ia memimpin desa, tidak ada halangan sedikit pun dalam berinteraksi dengan masyarakat desa itu yang hampir seluruhnya (70%) beragama Islam. Meskipun kepala desa ini beragama Kristen, ia juga sering menghadiri acara Yasinan atau selamatan yang kental dengan nuansa budaya keislaman.

Kesiapan untuk menang dan kalah. Proses suksesi kepemimpinan selalu berujung pada dua kenyataan: menang dan kalah. Kematangan jiwa berdemokrasi antara lain ditandai dengan kesiapan untuk menerima hasil prosesi demokrasi, apa pun hasilnya. Sering terjadi, para kandidat hanya siap menang tetapi tidak siap kalah. Dalam Pilkades di Kecamatan Lage tidak ada komplain yang berarti atau penolakan dan, bahkan, gugatan dari pihak yang kalah dalam pemilihan. Mereka menerima secara legowo meskipun guratan kekecewaan tidak bisa disembunyikan karena pada umumnya telah menghabiskan dana ratusan juta

rupiah. Penerimaan kekalahan itu ditindaklanjuti dengan dukungan pada kandidat yang terpilih.

Tidak adanya gugatan atau konflik pasca Pilkades, antara lain, disebabkan telah dipenuhinya prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pilkades, seperti netralitas panitia, tidak adanya politisasi birokrasi desa, *fairness*, dan minimnya pelanggaran atau kecurangan. Khusus di Desa Silanca ada sedikit masalah, dimana elite politiknya sudah menerima kekalahan, tetapi pendukungnya masih mempermasalahkannya.

Fenomena kesiapan untuk mengakui kekalahan dan pemberian dukungan pada calon terpilih yang notabene sebelumnya sebagai lawan politik serta terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pilkades merupakan pendidikan politik yang cukup baik dan para elite lokal. Ini merupakan cikal bakal demokrasi yang sangat penting bagi masa depan sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

Ketiga, tingginya kesadaran politik masyarakat. Pilkades di Kecamatan Lage menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpinnya yang kelak akan merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan publik yang terkait dengan dirinya sebagai warga desa. Hal itu ditunjukkan dengan minimnya angka golput dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Poso, antusiasme warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Lage menunjukkan tingginya kesadaran politik masyarakat. Dalam perspektif demokrasi, Hal ini bermakna tingginya tingkat legitimasi pemimpin yang terpilih sehingga ia dapat menjalankan roda pemerintahan desa secara lebih baik.

Keempat, masuknya pengaruh teknologi politik. Salah satu ciri modernisasi adalah adanya akomodasi atau penerimaan terhadap teknologi modern. Dalam perkembangan pelaksanaan demokrasi kontemporer, hal itu ditandai dengan masuknya pengaruh teknologi dalam politik.

Misalnya penggunaan *quick count* untuk mengetahui secara dini hasil Sebuah pemilihan. Selama ini metode *quick count* hanya dikenal di kota kota besar, dalam Pemilu atau Pilkada.

KESIMPULAN

Nilai-nilai positif dalam konteks demokrasi lokal, Pilkades di Kecamatan Lage berpotensi menciderai demokrasi. Pertama, munculnya calon tunggal. Dari 16 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Meskipun waktu pendaftaran sudah diundur, tidak ada warga masyarakat yang 'berani' mendaftar sebagai kandidat. Alasan yang selalu dikemukakan adalah tingginya biaya politik (*political cost*) yang harus ditanggung para calon sehingga tidak ada kandidat lain yang bisa disandingkan dalam Pilkades.

SARAN

Terlepas dan sejumlah kekurangan, pelaksanaan suksesi kepemimpinan lokal di sejumlah daerah yang diteliti di Kecamatan Lage bisa menghancurkan harapan yang cerah terhadap masa depan demokrasi di Indonesia pada umumnya, oleh karena itu Nilai-nilai demokrasi secara perlahan harus sudah membudaya di kalangan masyarakat hingga di desa-desa. Beberapa perilaku yang berpotensi menciderai demokrasi di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, "Demokrasi dan Budaya Politik Lokal", Workshop di Universitas Airlangga, Surabaya, 28 Mei 2007.
- Hidayat, Djarot Saiful (Kata Pengantar), *Fajar Menyingsing di Kota Blitar*, Blitar: Pemkot Blitar, 2004.
- Zuhro, R. Siti, "Perjuangan Mewujudkan Demokrasi Lokal Melalui Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi dalam Pilkada

Jember Jawa Timur", *Masyarakat Indonesia*, LIPI, jilid XXXI, No.2, 2005.

- Zuhro, R. Siti, "The Impact of A Neutrality Bureaucracy in the 1999 Elections: Case Studies in East Java and South Sulawesi" dalam *Local Democracy and Bureaucratic Reform: Selected Articles*, Jakarta: The Habibie Center, 2007
- Zuhro, R. Siti, *Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Rifai, Mien Ahmad, *Manusia Madura*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007 Sinambela Lijian Poltak, dkk 2007. Reformasi Pelayanan Publik. PT Bumi Aksara Jakarta 2007
- Thoha, M. 1992. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Tjokominoto, B. 1983. *Teori Strategi Pembangunan untuk Nasional*. Jakarta: Gunung Agung